

Kritik *Degrowth* Ruang Terbuka Hijau sebagai Barang Publik di Surakarta: *Literature Review*

Yosep Tegar Prameswara^{a,*}, Ramadhan Defitri Pratama^b, Maya Rohmantika Sari^c, Mintasih Indriayu^d

^{a, b, c, d} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*e-mail: yoseptegar2@gmail.com

KETERANGAN ARTIKEL

Diajukan:
13 Januari 2025
Direvisi:
24 Maret 2025
Diterima:
29 Maret 2025
Tersedia Online:
31 Maret 2025

*Correspondence Author

Nama:
Yosep Tegar
Prameswara
e-mail:
yoseptegar2@gmail.com
[m](#)

ABSTRAK

Urbanisasi di Indonesia menyebabkan penyusutan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang krusial bagi keseimbangan ekologi dan kualitas hidup. Kota Surakarta hanya memiliki 14% RTH, jauh di bawah standar 30% sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Degrowth* menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial daripada pertumbuhan ekonomi eksploitatif. Dalam kerangka kritik *degrowth*, penelitian ini mengkaji RTH sebagai barang publik, menyoroti ketimpangan akses dan privatisasi ruang hijau. Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan untuk menganalisis kebijakan dan tantangan terkait Ruang Terbuka Hijau. Artikel ini mengkaji fenomena tersebut dari perspektif ilmu ekonomi, khususnya dalam konteks barang publik dan teori eksternalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan, dengan pengelolaan berbasis komunitas, regulasi ketat terhadap privatisasi lahan hijau, dan pemanfaatan teknologi hijau. Studi ini menawarkan perspektif alternatif dalam perencanaan tata ruang yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata Kunci: *degrowth*; ruang terbuka hijau; keberlanjutan; surakarta

ABSTRACT

Urbanization in Indonesia has led to the shrinking of Green Open Space (RTH), which is crucial for ecological balance and quality of life. Surakarta City has only 14% green space, far below the 30% standard set by Law No. 26/2007 on Spatial Planning. *Degrowth* offers an alternative approach that emphasizes ecological sustainability and social justice over exploitative economic growth. Within the framework of *degrowth* critique, this research examines green spaces as public goods, highlighting inequality of access and privatization of green spaces. This article uses a literature review method to analyze policies and challenges related to Green Open Space. The article examines the phenomenon from the perspective of economics, particularly in the context of public goods and externality theory. The results of this study indicate the need for more sustainability-oriented policies, with community-based management, strict regulation of green land privatization, and the use of green technology. This study offers an alternative perspective in spatial planning that is balanced between economic, social, and environmental aspects.

Keywords: *degrowth*; green open space; sustainability; surakarta

PENDAHULUAN

Urbanisasi yang terus meningkat di Indonesia membawa berbagai tantangan besar terhadap keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi kota. Kota Surakarta, sebagai salah satu kota besar yang sedang berkembang pesat, menghadapi masalah serupa (Cahyani, et al. 2024). Dalam teori ekonomi, RTH dikategorikan sebagai barang publik karena memiliki sifat *non-rivalrous* dan *non-excludable*, yang berarti konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi manfaat bagi individu lain, dan tidak ada pihak yang dapat dikecualikan dari penggunaannya. Dalam praktiknya, privatisasi dan alih fungsi lahan hijau sering kali mengurangi sifat publik dari RTH, menyebabkan ketimpangan akses dan menimbulkan eksternalitas negatif terhadap masyarakat (Musyary & Buchori, 2024). Data menunjukkan bahwa proporsi RTH di kota ini hanya mencapai 14% dari total luas wilayah, jauh di bawah standar minimal 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Musyary & Buchori, 2024). Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan ekologis dan tekanan pembangunan infrastruktur serta permukiman.

Polusi udara di daerah perkotaan terus meningkat, terutama di kota-kota besar dengan lalu lintas yang padat (Musyary & Buchori, 2024). Tanaman hijau memainkan peran penting dalam menurunkan polusi udara dengan menyerap karbon dioksida, sehingga menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi karbon, terutama di sekitar jalan raya (Nurohma & Sari, 2023). Pohon-pohon besar seperti Mahoni, Jati, dan Angsana memiliki kapasitas optimal dalam mendukung fungsi ini. PM10, sebagai salah satu indikator utama kualitas udara (Musyary & Buchori, 2024; Sakieh, et al., 2017), membutuhkan perhatian khusus dari para pembuat kebijakan di perkotaan. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan memperluas dan mengoptimalkan penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terbukti mampu membantu menurunkan tingkat pencemaran udara di perkotaan (Musyary & Buchori, 2024).

Sebagai barang publik, RTH memiliki fungsi yang sangat krusial. Tidak hanya sebagai penyedia manfaat ekologis seperti pengendalian suhu, pengurangan polusi udara, dan penyediaan oksigen (Ally, et al., 2024; Dr. Mahipal, et al., 2024; Sambur, 2021), tetapi juga sebagai ruang sosial untuk rekreasi dan interaksi masyarakat (Rangkuti, et al., 2023; Rizal, et al., 2024). Sayangnya, banyak lahan hijau di kota-kota besar yang telah dikonversi menjadi area komersial atau pemukiman untuk mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek (Mahdiyah, et al., 2022; Sari & Navitas, 2023). Komersialisasi ini sering kali mengorbankan kepentingan publik, mempersempit akses masyarakat terhadap RTH, dan memperparah ketimpangan sosial dalam distribusi ruang hijau (Azra, 2024; Bobot, et al., 2023; Maria, et al., 2022).

Dalam konteks kritik *degrowth*, fenomena ini menjadi salah satu sorotan utama. *Degrowth* menawarkan pandangan alternatif terhadap pembangunan, dengan menekankan pentingnya pengurangan konsumsi sumber daya yang berlebihan dan prioritas pada keberlanjutan ekologis serta keadilan sosial (Hickel, 2021). Dalam paradigma ini, RTH tidak hanya dianggap sebagai elemen kota yang mendukung lingkungan, tetapi juga sebagai ruang yang *esensial* untuk mendukung kualitas hidup masyarakat secara *holistic* (Akbulut, 2021). Meskipun demikian, pendekatan ini membutuhkan perubahan paradigma pembangunan yang sering kali bertentangan dengan orientasi ekonomi dominan (Belmonte-Ureña, et al., 2021; Hickel, 2021).

Kritik *degrowth* juga menyoroti ketimpangan akses terhadap RTH yang sering kali memperburuk kesenjangan sosial di perkotaan (Sekulova, et al., 2013; Xue, 2014). Di beberapa kota besar, ruang hijau yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat malah menjadi komoditas eksklusif yang hanya dinikmati kelompok tertentu (Sary & Jaya, 2021; Windiati, et al., 2024). Privatisasi ruang hijau, seperti taman yang menjadi bagian dari kompleks perumahan elit atau kawasan komersial, semakin menutup peluang masyarakat luas untuk mendapatkan manfaat ekologis dan sosial dari RTH. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa RTH adalah barang publik yang seharusnya inklusif (Hanan & Ariastita, 2021; Isma, et al., 2025).

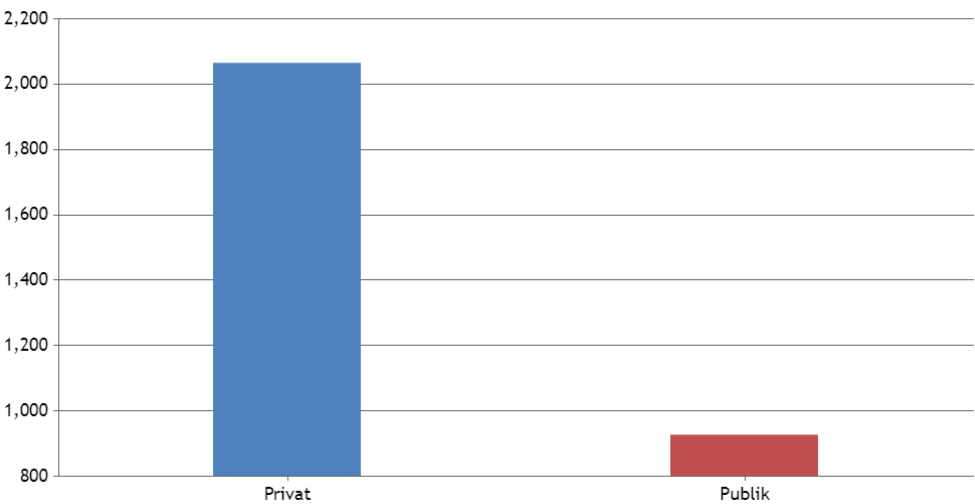
Kondisi di Surakarta menjadi contoh nyata dari tantangan ini. Faktanya 90% wilayah kota yang telah terisi bangunan, hanya sedikit ruang yang tersisa untuk pengembangan RTH hanya 1,1 % dari luas wilayah kota. Kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan memperburuk situasi ini.

Tabel 1. Ruang Terbuka Hijau Kota Surakarta

Kota	Luas wilayah (KM ²)	Luas RTH (KM ²)	Dalam persen RTH (%)
Surakarta	46.72	0.51202	1.10

Sumber: sipsn@menlhk.go.id, 2024

Selanjutnya, dominasi sektor swasta dalam pengelolaan lahan sering kali tidak selaras dengan prinsip *degrowth*, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam perencanaan kota. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk memastikan keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan sosial masyarakat.



Gambar 1. Jumlah RTH Publik dan Privat di Kota Surakarta

Sumber: <http://rth.surakarta.go.id>, 2024

Meskipun banyak penelitian telah membahas pentingnya RTH dalam tata kota, sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis atau sekadar mengidentifikasi dampak urbanisasi terhadap penyusutannya. Kajian yang secara eksplisit menghubungkan pengelolaan RTH dengan pendekatan *degrowth* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana konsep *degrowth* dapat diterapkan dalam pengelolaan RTH sebagai barang publik, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam mempertahankan dan memperluas RTH, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip *Degrowth*

Prinsip *Degrowth* adalah sebuah konsep yang menekankan perlunya mengurangi ketergantungan pada pertumbuhan ekonomi demi mencapai keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia (D’Alisa & Kallis, 2020). *Degrowth* bukan berarti "tidak ada pertumbuhan sama sekali," melainkan sebuah pendekatan yang mengkritisi paradigma pertumbuhan ekonomi tak terbatas yang sering dianggap merusak ekosistem dan memperparah ketimpangan sosial (Hickel, 2021). Konsep ini berfokus pada beberapa prinsip utama, seperti keberlanjutan ekologis yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam melalui pengurangan konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan (Akbulut, 2021; Hickel et al., 2022). Selain itu, *degrowth* mendorong redistribusi sumber daya secara adil untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air, pendidikan, dan kesehatan (Buch-Hansen & Nesterova, 2023).

Prinsip *degrowth* juga mengedepankan kesejahteraan tanpa ketergantungan pada konsumsi berlebihan, dengan mendorong gaya hidup sederhana di mana kebahagiaan diukur dari hubungan sosial, kesehatan, dan harmoni dengan alam, bukan dari kekayaan material. Pendekatan ini mendukung penguatan ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada perdagangan global yang sering kali memperparah eksploitasi

lingkungan dan ketidakadilan sosial (Buch-Hansen & Nesterova, 2023; Hickel, 2021). Model pertumbuhan ekonomi saat ini sering kali mengabaikan batas-batas ekologis bumi, sehingga *degrowth* muncul sebagai alternatif untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketimpangan ekonomi (Akbulut, 2021). Melalui penerapan prinsip ini, masyarakat global diharapkan dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan adil. Meskipun demikian, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan besar, seperti resistensi dari sistem ekonomi berbasis pertumbuhan, kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lapangan kerja, serta perlunya perubahan budaya secara besar-besaran untuk menerima gaya hidup yang lebih sederhana (D'Alisa & Kallis, 2020). *Degrowth* mengundang masyarakat untuk berpikir ulang tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup, dengan tujuan membangun dunia yang lebih berimbang, berkelanjutan, dan inklusif (Hickel, 2021; Hickel et al., 2022).

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam tata kota yang berfungsi sebagai ruang publik maupun ruang konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem (Huang & Lin, 2023). Secara umum, RTH dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu RTH publik yang meliputi taman kota, lapangan, dan hutan kota, serta RTH privat seperti taman di area perumahan atau lahan hijau milik institusi tertentu (Poortinga, et al., 2021). Keberadaan RTH memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekologis, sosial, hingga ekonomi (Reyes-Riveros et al., 2021a; Zhang et al., 2022). Dalam aspek ekologis, RTH berfungsi sebagai penyerap karbon, pengendali suhu mikro, peredam banjir, serta habitat keanekaragaman hayati. Keberadaan RTH membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat perkotaan, terutama di tengah peningkatan suhu akibat urbanisasi dan perubahan iklim.

Dalam aspek sosial, RTH berperan sebagai ruang interaksi dan rekreasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran RTH memberikan ruang bagi aktivitas olahraga, bersosialisasi, atau sekadar menikmati waktu luang, yang berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental (Berdejo-Espinola et al., 2021). Selain itu, RTH memiliki fungsi estetika yang meningkatkan daya tarik visual suatu kawasan, sehingga mampu menciptakan identitas kota yang unik dan menarik (Wu et al., 2022). Dalam konteks ekonomi, RTH dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya, menarik wisatawan, serta membuka peluang ekonomi lokal melalui aktivitas di sekitar ruang hijau, seperti pasar seni atau kuliner. Dalam pengelolaan dan pengembangan RTH di banyak daerah masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah tekanan terhadap lahan hijau akibat urbanisasi yang masif (Cahyani et al., 2024). Lahan hijau sering kali dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur atau kawasan komersial (Wibowo, Rahayu, & Kusumastuti, 2024). Selain itu, minimnya anggaran untuk pemeliharaan RTH serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau turut menjadi kendala dalam pengelolaan RTH. Dalam konteks kebijakan, beberapa kota masih belum memenuhi standar minimal RTH yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 30% dari luas wilayah, dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat (Wibowo et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan, yang melibatkan pengkajian berbagai pemikiran dan temuan dari jurnal, skripsi, serta hasil penelitian terkait untuk menghasilkan informasi ilmiah (Azizah & Abadi, 2022). Objek kajian ini berfokus pada ruang terbuka hijau di Kota Surakarta sebagai barang publik (*public goods*) dalam konteks prinsip *degrowth*. Data mengenai kondisi RTH di Surakarta diperoleh dari laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan tata ruang, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi dari penyusutan RTH. Penulis memulai dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi, menelaah teori-teori yang relevan, dan menganalisis berbagai data serta informasi yang telah disajikan (Hoesny & Darmayanti, 2021). Pengumpulan jurnal penelitian dilakukan menggunakan *google scholar*.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

No	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1	Jurnal terindeks (Scopus atau Sinta atau berita atau dokumen pemerintah)	Jurnal tidak terindeks, skripsi, tesis, disertasi,
2	Topik pembahasan tentang Ruang Terbuka Hijau, <i>Degrowth</i> , Keberlanjutan	Topik umum politik, kebudayaan, kesehatan,
3	Periode publikasi tahun 2010-2024	Publikasi jurnal sebelum tahun 2010
4	Menggunakan bahasa inggris atau bahasa indonesia	Tidak menggunakan bahasa inggris atau bahasa Indonesia
5	Metode yang digunakan kuantitatif, kualitatif, mix metode.	Penggunaan metode yang lemah

Sumber: Data diolah, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Degrowth dan Konsep Ruang Terbuka Hijau sebagai Barang Publik dan Eksternalitas Positif

Pembangunan kota hijau yang berkelanjutan sering kali dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi terhadap lingkungan. Konsep ruang terbuka hijau (RTH) sebagai barang publik memiliki peran kunci dalam hal ini (Nurliah & Tajuddin, 2021). RTH tidak hanya memberikan manfaat ekologis, seperti penyediaan oksigen, pengurangan polusi udara, dan pengendalian suhu, tetapi juga eksternalitas positif pada fungsi sosial yang tak kalah penting, seperti memberikan ruang untuk rekreasi, interaksi sosial, dan kesehatan mental (Aguspriyanti, 2021; Fainstein, 2015). Meskipun demikian, dalam kerangka *degrowth*, kritikan utamanya adalah model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan atau mengurangi ruang-ruang ini demi kepentingan komersial atau pemanfaatan lahan yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek.

Gerakan *degrowth* sendiri memandang bahwa keberlanjutan lingkungan dan sosial harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif (Akbulut, 2021). Jurnal lain memberi penjelasan mengenai *degrowth* merupakan pengurangan terukur dalam penggunaan *energy* dan sumber daya alam guna mengembalikan keseimbangan ekonomi dengan dunia kehidupan (Hickel, 2021). Dalam konteks RTH di Indonesia, ini berarti bahwa pengelolaan lahan kota harus mempertimbangkan manfaat ekologis dan sosial jangka panjang, bukan hanya mengejar profit atau memenuhi kebutuhan pembangunan komersial (Davidson & Gavris, 2024; Sekulova et al., 2013). Studi oleh Reyes-Riveros et al. (2021) menunjukkan bahwa ruang hijau perkotaan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tekanan psikologis dan meningkatkan kualitas udara. Sementara itu, Wu et al. (2022) menemukan bahwa keberadaan RTH dapat meningkatkan nilai ekonomi properti di sekitarnya, sehingga mendukung pendekatan berbasis insentif dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan. Pengurangan konsumsi dan konsumsi sumber daya alam yang lebih berkelanjutan menjadi inti dari kritik *degrowth*, di mana RTH menjadi simbol penting dalam upaya ini sebagai ruang yang dapat melawan degradasi ekologis yang sering terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali (Akbulut, 2021; Belmonte-Ureña et al., 2021).

Pertumbuhan penduduk dan Komersialisasi Lahan: Penyebab Penyusutan RTH

Pertumbuhan penduduk yang pesat di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan akhir-akhir ini di Kota Surakarta berkontribusi besar terhadap penyusutan ruang terbuka hijau (Kamila & Indrawati, 2023). Setiap tahun, pertumbuhan jumlah penduduk serta urbanisasi meningkatkan permintaan akan perumahan, fasilitas publik, dan infrastruktur lainnya, yang sering kali mengakibatkan konversi lahan hijau

menjadi area komersial atau pemukiman (Gw, Astuti, & Sp, 2020; Salmah, et al., 2024). Perubahan penggunaan lahan ini terjadi dalam upaya memenuhi kebutuhan ruang bagi populasi yang terus berkembang, meskipun demikian sering kali mengorbankan keberadaan RTH yang sebelumnya dapat memenuhi kebutuhan ekologis dan sosial masyarakat (Fitra & Sasana, 2021; Hidayah, Sativa, & H, 2021).

Komersialisasi lahan juga menjadi faktor signifikan yang memperburuk kondisi ini. Banyak area RTH yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan umum, seperti taman kota, jalur hijau, dan hutan kota, kini beralih fungsi menjadi proyek komersial—termasuk pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan apartemen mewah. Pemerintah kota Surakarta menyebut 90 persen wilayah Kota Surakarta terisi bangunan (Gw et al., 2020; Wahyu, 2023). Pengalihan fungsi lahan ini mengabaikan nilai sosial dan ekologi yang dimiliki oleh RTH, yang seharusnya dapat mendukung kualitas hidup dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan (Hidayah et al., 2021).

Dalam perspektif *degrowth*, kritik terhadap tren komersialisasi lahan ini adalah bahwa fokus utama harus dialihkan dari pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang berisiko merusak keberlanjutan lingkungan dan sosial, menuju pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan (Hickel, 2021). *Degrowth* menekankan pentingnya penggunaan lahan yang efisien, di mana ruang hijau dipertahankan dan diperluas, bukan dijadikan komoditas untuk mengejar keuntungan ekonomi semata (Sekulova et al., 2013).

Ketimpangan Akses dan Dampaknya pada Keadilan Sosial

Dalam kerangka *degrowth*, kritik terhadap distribusi RTH juga berhubungan dengan ketimpangan sosial yang dihasilkan dari ketidakadilan dalam penyediaan akses terhadap barang publik. Meskipun RTH seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, kenyataannya banyak kawasan perkotaan di Indonesia yang menciptakan pembatasan akses terhadap ruang hijau publik (Mashar, 2021). Hal ini sering terjadi di kawasan yang dikuasai oleh sektor swasta, di mana taman kota atau ruang hijau sering kali hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, khususnya mereka yang tinggal di kawasan kelas menengah ke atas (Azizi & Kouddane, 2024).

Ketidakadilan ini sejalan dengan kritik *degrowth* yang menyoroti bahwa pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi justru memperburuk ketidaksetaraan sosial (Hickel, 2021), di mana hanya sebagian kelompok yang mendapatkan manfaat dari proyek-proyek pembangunan. Sebagai contoh, pengembangan kompleks perumahan mewah yang tidak menyediakan akses publik ke ruang hijau, atau bahkan privatisasi taman kota yang mengurangi fungsinya sebagai ruang sosial untuk seluruh lapisan masyarakat, menunjukkan bagaimana RTH yang semula dimaksudkan sebagai barang publik, justru beralih menjadi komoditas eksklusif (Dewi, Pramana, & Sudiarta, 2024).

Potensi Solusi Berdasarkan Prinsip *Degrowth*

Untuk mengatasi masalah ini, perspektif *degrowth* menawarkan beberapa solusi alternatif. Salah satunya adalah penekanan pada penggunaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan, dengan mengurangi ketergantungan pada pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi (Akbulut, 2021). RTH harus dipandang sebagai bagian integral dari perencanaan kota yang berkelanjutan, yang melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan (Leng, et al., 2024). Mengacu pada Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota harus paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau ini terdiri dari 20 persen lahan pemerintah, dan 10 persen lahan privat. Sementara itu, data website rth.surakarta.go.id tahun 2023, RTH di Kota Surakarta seluas 373,07 hektare (Ha). Rinciannya, 187,56 Ha merupakan RTH taman dan hutan kota; 21,17 Ha merupakan RTH jalur hijau jalan; dan 164,33 Ha RTH tertentu seperti bantaran sungai dan lainnya. Artinya, proporsi RTH baru 14 persen, hampir 90 persen lahan di Kota Surakarta terisi bangunan (Wahyu, 2023). Dalam hal ini, pemerintah Kota Surakarta perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatur dan melindungi ruang publik dengan kebijakan yang mendukung ekosistem perkotaan yang sehat.

Selain itu, penerapan teknologi hijau dan pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan RTH dapat membantu meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa kota di Indonesia, seperti Surabaya, telah mulai mengimplementasikan kebijakan untuk memperkuat keberadaan RTH, seperti program penghijauan dan revitalisasi lahan kosong untuk taman kota (Kadri, et al., 2023). Pendekatan ini lebih menekankan pada penyediaan ruang hijau yang terjangkau dan inklusif, yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Kota Surakarta

Meskipun konsep *degrowth* menawarkan solusi yang lebih *inklusif* dan berkelanjutan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan kelestarian lingkungan. Ditambah lagi, sektor swasta yang dominan dalam pengelolaan lahan sering kali memiliki kepentingan yang bertentangan dengan prinsip *degrowth*. Oleh karena itu, perubahan paradigma dalam perencanaan kota di Indonesia memerlukan dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Akan tetapi, banyak yang meragukan bahwa transformasi *degrowth* dapat diimplementasikan melalui perencanaan kota, karena memerlukan perubahan budaya dan politik yang mendalam (Cristiano, 2020). Kebijakan *de-growth* semacam itu sulit dilaksanakan dari atas ke bawah. Sebaliknya, kebijakan tersebut memerlukan kolaborasi antar penduduk dan perubahan perilaku, penelitian sebelumnya memberikan argumen tentang bagaimana proses perencanaan perlu diubah, menjadi lebih inklusif, dari bawah ke atas, dan terbuka terhadap eksperimen (Xue, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusutan RTH di Surakarta mencerminkan kegagalan pasar dalam menyediakan barang publik yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, intervensi kebijakan diperlukan untuk mengoreksi eksternalitas negatif dari hilangnya RTH dan memastikan distribusi yang lebih adil. Dalam konteks kritik *degrowth*, kondisi yang terjadi pada kota Surakarta menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam perencanaan kota. Model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan perlu mendapat perhatian lebih, terutama dalam memastikan bahwa RTH tetap menjadi barang publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tata ruang harus lebih berpihak pada keseimbangan ekologis, bukan hanya kepentingan ekonomi jangka pendek. Pengelolaan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat turut berperan dalam menjaga dan mengembangkan RTH, sementara penerapan teknologi hijau dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya dukung ruang terbuka hijau dalam konteks urbanisasi yang terus berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *degrowth* dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi ketimpangan akses dan penyusutan RTH di Surakarta. Kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan dapat membantu menciptakan tata ruang kota yang seimbang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum menguji penerapan kebijakan secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna memahami tantangan implementasi *degrowth* serta membandingkan kebijakan serupa di kota lain untuk merumuskan strategi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspriyanti, C. D. (2021). Green Corridors: Potensi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik Ramah di Kota Padat (Studi Kasus Kota Malang). *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/jaz.v4i2.33439>
- Akbulut, B. (2021). *Degrowth. Rethinking Marxism*, 33(1), 98–110. <https://doi.org/10.1080/08935696.2020.1847014>
- Ally, H., Wahyuningtyas, J., & Rahmadana, M. I. (2024). Analisis Jasa Lingkungan di Taman Hutan Kota, GBK, Jakarta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13234>
- Azizah, R. N., & Abadi, A. P. (2022). Kajian Pustaka: Resiliensi dalam Pembelajaran Matematika. *Didactical Mathematics*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31949/dm.v4i1.2061>
- Azizi, L., & Kouddane, N. (2024). The green city as a driver of sustainable development. *Journal of Umm Al-Qura University for Engineering and Architecture*, 15(4), 384–397. <https://doi.org/10.1007/s43995-024-00077-x>

- Azra, A. A. (2024). Analisis Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis (SIG) Di Kabupaten Sidoarjo. *Elipsoida : Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2024.20098>
- Belmonte-Ureña, L. J., Plaza-Úbeda, J. A., Vazquez-Brust, D., & Yakovleva, N. (2021). Circular economy, *degrowth* and green growth as pathways for research on sustainable development goals: A global analysis and future agenda. *Ecological Economics*, 185, 107050. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107050>
- Berdejo-Espinola, V., Suárez-Castro, A. F., Amano, T., Fielding, K. S., Oh, R. R. Y., & Fuller, R. A. (2021). Urban green space use during a time of stress: A case study during the COVID-19 pandemic in Brisbane, Australia. *People and Nature*, 3(3), 597–609. <https://doi.org/10.1002/pan3.10218>
- Bobot, M. D., Kurniati, A. C., & Efendi, H. (2023). Identifikasi Kondisi Eksisting RTH Publik di Kota Yogyakarta. *MATRA*, 4(1), Article 1.
- Buch-Hansen, H., & Nesterova, I. (2023). Less and more: Conceptualising *degrowth* transformations. *Ecological Economics*, 205, 107731. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107731>
- Cahyani, A. F., Sarwono, & Nugraha, S. (2024). Hubungan Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Ruang Terbuka Hijau dengan Partisipasinya dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Tahun 2023. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/5w59v403>
- Cristiano, S. (2020). A. Nelson and F. Schneider (Eds.): Housing for *degrowth*: principles, models, challenges, and opportunities. Routledge, 2019, 296 pp. ISBN: 9780367358334. *Journal of Housing and the Built Environment*, 35(3), 1001–1003. <https://doi.org/10.1007/s10901-020-09746-4>
- D’Alisa, G., & Kallis, G. (2020). *Degrowth* and the State. *Ecological Economics*, 169, 106486. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106486>
- Davidson, J. P. L., & Gavis, M. (2024). Towards a *degrowth* transition: Bringing interests back in. *New Political Economy*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2024.2389506>
- Dewi, I. G. A. W. K., Pramana, I. M. W., & Sudiarta, I. K. (2024). Analisis Kelayakan Investasi Proyek Pembangunan Aswara Resort Manuaba Ubud. *Jurnal Talenta Sipil*, 7(2), 906–916.
- Dr. Mahipal, S. H., Setiadi, A. N., Sasiras, A. A., Irawan, M. L., & Abdullah, N. (2024). Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Bogor. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.732>
- Fainstein, S. (2015). Resilience and Justice. *International Journal of Urban and Regional Research*, 39(1), 157–167. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12186>
- Fitra, F., & Sasana, H. (2021). Analisis Valuasi Ekonomi dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang (Studi Kasus: Taman Indonesia Kaya). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/djoe.29996>
- Gw, G. W., Astuti, W., & Sp, T. (2020). Kesesuaian Program Kampung Iklim Sekip Kadipiro Surakarta dalam Mendukung Upaya Mewujudkan Kota Hijau. *Ekosains*, 12(1), Article 1. <https://jurnal.uns.ac.id/ekosains/article/view/81220>
- Hanan, H. M., & Ariastita, P. G. (2021). Penilaian Efektivitas Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), D47–D52.

<https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.52902>

- Hickel, J. (2021). What does *degrowth* mean? A few points of clarification. *Globalizations*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14747731.2020.1812222>
- Hickel, J., Kallis, G., Jackson, T., O'Neill, D. W., Schor, J. B., Steinberger, J. K., Victor, P. A., & Ürge-Vorsatz, D. (2022). *Degrowth* can work—Here's how science can help. *Nature*, 612(7940), 400–403. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-04412-x>
- Hidayah, R., Sativa, S., & H, S. (2021). Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta. *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/inersia.v17i1.40765>
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), Article 2.
- Huang, W., & Lin, G. (2023). The relationship between urban green space and social health of individuals: A scoping review. *Urban Forestry & Urban Greening*, 85, 127969. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.127969>
- Isma, I., Irawan, A. F., Meliyana, N., & B, I. B. I. (2025). Barang Publik Dan Eksternalitas: Tinjauan Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Perspektif Islam Dalam Pengelolaan Sumber Daya (Studi Kasus Taman Bersemi Stq). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), Article 4.
- Kadri, M. K., Purba, R. A. G., & Fitriani, Y. (2023). Kesesuaian Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Berdasarkan Standar Minimal Pelayanan Penduduk di Kota Surabaya. *COMPACT: Spatial Development Journal*, 2(1). <https://journal.itk.ac.id/index.php/compact/article/view/853>
- Kamila, R. Z., & Indrawati, I. (2023). Persepsi dan Preferensi Pengguna Ruang Terbuka Hijau Surakarta (Studi Kasus: Monumen 45 Banjarsari). *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 418–428.
- Leng, A., Wang, K., Bai, J., Gu, N., & Feng, R. (2024). Analyzing sustainable development in Chinese cities: A focus on land use efficiency in production-living-ecological aspects. *Journal of Cleaner Production*, 448, 141461.
- Mahdiyah, U., Akbar, A. A., & Romiyanto, R. (2022). Keterkaitan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Resapan Air. *Journal of Environmental Policy and Technology*, 1(1). <https://doi.org/10.31764/jeptec.v1i1.11823>
- Maria, M., Najib, N. N., & Anugrah, A. (2022). Kenyamanan Termal dan Visual Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palopo. *EnviroScienteeae*, 18(1), 158–167. <https://doi.org/10.20527/es.v18i1.13005>
- Mashar, M. F. (2021). Fungsi Psikologis Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 1930–1943. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.332>
- Musyary, M. D., & Buchori, I. (2024a). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Mengurangi Pencemaran Udara di Kawasan Metropolitan Surakarta untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Rekayasa Hijau*, 8(2), 137–149. <https://doi.org/10.26760/jrh.v8i2.137-149>
- Musyary, M. D., & Buchori, I. (2024b). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Mengurangi Pencemaran Udara di Kawasan Metropolitan Surakarta untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.26760/jrh.v8i2.137-149>
- Nurliah, N., & Tajuddin, M. S. (2021). Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu*

Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v5i1.1852>

- Nurohma, A., & Sari, D. K. (2023). Aplikasi Citra Landsat 8 OLI/TIRS Untuk Mengestimasi Parameter Kualitas Udara PM10 dan CO di Kota Bandung. *Prosiding FTSP Series*, 1267–1272.
- Poortinga, W., Bird, N., Hallingberg, B., Phillips, R., & Williams, D. (2021). The role of perceived public and private green space in subjective health and wellbeing during and after the first peak of the COVID-19 outbreak. *Landscape and Urban Planning*, 211, 104092. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104092>
- Rangkuti, Y. A., Kurniawan, R., Syaleh, M., & Pujiati, A. (2023). Kontribusi Olahraga Rekreasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Olahraga Dan Kesehatan Indonesia (JOKI)*, 3(2), 139–145. <https://doi.org/10.55081/joki.v3i2.875>
- Reyes-Riveros, R., Altamirano, A., De La Barrera, F., Rozas-Vásquez, D., Vieli, L., & Meli, P. (2021a). Linking public urban green spaces and human well-being: A systematic review. *Urban Forestry & Urban Greening*, 61, 127105. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127105>
- Reyes-Riveros, R., Altamirano, A., De La Barrera, F., Rozas-Vásquez, D., Vieli, L., & Meli, P. (2021b). Linking public urban green spaces and human well-being: A systematic review. *Urban Forestry & Urban Greening*, 61, 127105. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127105>
- Rizal, M., Dianfitri, M., & Nurhidayati, S. (2024). Evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu Playground di Kelurahan Sempaja Timur. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), Article 1.
- Sakieh, Y., Jaafari, S., Ahmadi, M., & Danekar, A. (2017). Green and calm: Modeling the relationships between noise pollution propagation and spatial patterns of urban structures and green covers. *Urban Forestry & Urban Greening*, 24, 195–211.
- Salmah, E., Harsono, I., Ismiwati, B., Wijimulawiani, B. S., & Handayani, T. (2024). Determinan Permintaan Perumahan Di Kota Mataram. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 76–84.
- Sambur, R. C. (2021). Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/31504>
- Sari, I. F., & Navitas, P. (2023). Menghijaukan Jakarta Selatan: Arahkan Ruang Terbuka Hijau di Mampang Prapatan. *Jurnal Teknik ITS*, 12(3), C172–C178. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v12i3.130765>
- Sary, R. K., & Jaya, M. A. (2021). Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Publik Yang Ramah Disabilitas Di Benteng Kuto Besak Palembang. *Arsir*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32502/arsir.v5i1.3520>
- Sekulova, F., Kallis, G., Rodríguez-Labajos, B., & Schneider, F. (2013). *Degrowth*: From theory to practice. *Journal of Cleaner Production*, 38, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.06.022>
- Wahyu, T. (2023). Minim Ruang Terbuka Hijau, 90 Persen Kota Solo Terisi Bangunan. *Detik.Com*.
- Wibowo, B. R. G., Rahayu, P., & Kusumastuti, K. (2024). Peri-urbanisasi dan Perubahan Struktur Ruang Perkotaan di Kawasan Solo Baru. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v6i1.76288.26-41>
- Windiaty, W., Ichsan, A. C., & Aji, I. M. L. (2024). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Kota Giri Menang: Implementation Of the Green Open Space (RTH) Policy at Giri Menang City Park. *HUTAN TROPIKA*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.36873/jht.v19i2.17763>

- Wu, C., Du, Y., Li, S., Liu, P., & Ye, X. (2022a). Does visual contact with green space impact housing prices? An integrated approach of machine learning and hedonic modeling based on the perception of green space. *Land Use Policy*, 115, 106048. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106048>
- Wu, C., Du, Y., Li, S., Liu, P., & Ye, X. (2022b). Does visual contact with green space impact housing prices? An integrated approach of machine learning and hedonic modeling based on the perception of green space. *Land Use Policy*, 115, 106048. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106048>
- Xue, J. (2014). Is eco-village/urban village the future of a *degrowth* society? An urban planner's perspective. *Ecological Economics*, 105, 130–138. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.06.003>
- Zhang, Q., Zhou, D., Xu, D., & Rogora, A. (2022). Correlation between cooling effect of green space and surrounding urban spatial form: Evidence from 36 urban green spaces. *Building and Environment*, 222, 109375. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109375>